



Warga Dapat Rp600 Ribu dari Pemkot Yogya

■ Sebanyak 4.276 KPM Segera Nikmati BLT BBM

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak 4.276 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Yogyakarta segera menikmati bantuan langsung tunai (BLT) imbas kenaikan harga BBM. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akhirnya menetapkan formulasi bantuan yang bersumber dari 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) melalui APBD Perubahan.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Maryustion Tomang, menuturkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi, pihaknya wajib mengalokasikan bantuan tersebut.

"Itu di perubahan. Bentuknya sama, BLT BBM, besarnya Rp600 ribu. Penyalurannya sekali saja, kalau yang pusat kan dua tahap, masing-masing Rp300 ribu. Alokasinya ini untuk 4.276 keluarga di kota," urainya, Selasa (20/9).

Maryustion memaparkan, angka tersebut bersumber dari KSJPS (Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial) yang masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Lalu, data-data itu, disandingkan dengan daftar penerima PKH dan BNPT, yang terdapat di wilayah Kota

Yogyakarta.

"Jadi, istilahnya, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT BBM ini mereka yang sama sekali belum tersentuh bantuan, ya, termasuk BLT BBM pemerintah pusat," tandasnya.

Hanya saja, sampai sejauh ini, ia belum bisa memastikan, mengenai waktu penyaluran BLT BBM yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta tersebut. Hal ini karena rancangan APBD harus dievaluasi oleh Gubernur Sri Sultan HB X.

"Nah, ini masih menunggu Pak Gubernur, kemarin sudah penandatanganan kesepakatan APBD Perubahan dari Pak Pj Wali Kota dan dewan. Tapi, itu kan harus dibawa dulu ke provinsi (DIY), untuk dievaluasi," urai Maryustion.

Pihaknya sejauh ini masih menyiapkan prosedur administrasinya. "Nanti, kerja sama dengan Kantor Pos juga untuk penyalurannya, seperti BLT BBM dari pusat, polanya sama," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, berujar, sejak awal pihaknya memang memfokuskan pemanfaatan alokasi 2 persen DTU untuk upaya perlindungan sosial, terutama bagi warga yang belum tersentuh BLT.

JARING PENGAMAN SOSIAL

- Sebanyak 4.276 KPM di Kota Yogyakarta segera menikmati BLT imbas kenaikan harga BBM.
- Besaran BLT Rp600 ribu dan penyalurannya sekali saja.
- Pemerintah DIY menyiapkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk menekan laju inflasi.
- Anggaran akan segera disalurkan ke masyarakat dengan bentuk subsidi ongkos kirim (ongkir) bagi pelaku UMKM serta penyelenggaraan operasi pasar.

"Untuk sektor transportasi, sesuai kewenangan di provinsi. Kemudian ojek, selain bukan merupakan transportasi umum, datanya juga sulit diakses. Lalu, untuk becak, serta andong karena tidak terdampak langsung dengan BBM, mereka belum bisa diberikan juga," pungkasnya.

Sementara itu, Pemerintah DIY menyiapkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk menekan laju inflasi di daerah imbas penyesuaian kenaikan harga BBM. Sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, dana diperoleh dari 2 persen DTU, yaitu DAU, dan DBH.

Anggaran akan segera disalurkan ke masyarakat dengan bentuk subsidi ongkos kirim (ongkir) bagi pelaku UMKM serta penyelenggaraan operasi pasar.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menuturkan, saat ini angka inflasi di DIY tergolong tinggi.

Yakni di atas angka 5 persen atau di atas rata-rata nasional. "Yang andil cukup banyak kecuali sembako dan makanan, tiket pesawat itu harga melambung tinggi tapi tetap dibeli masyarakat nah itulah pemicu inflasi," terang Aji.

Aji menjelaskan, subsidi ongkir bagi pelaku UMKM bukanlah hal baru. Program tersebut dicanangkan oleh Diskop UMKM DIY saat awal pandemi Covid-19 merebak. Tujuannya mengurangi beban pelaku UMKM akibat kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan. Pemda DIY pun memberi relaksasi kepada usaha kecil dengan menanggung ongkir atas pembelian produk UMKM. Sejauh ini tercatat ada sekitar 4.000 produk dari 1.800 pelaku usaha yang tergabung dalam program marketplace lokal yang tengah merasakan relaksasi pembayaran ongkir tersebut. (**hdatro**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005